PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM KLAUSULA BAKU DITINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ardiansyah

Email: ardy.rizky29@gmail.com

Universitas Tadulako

Abstrak

Salah satu Asas Utama yang melandasi hukum perjanjian adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini membawa pengertian bahwa setiap orang memiliki posisi tawar menawar dan kedudukan yang seimbang dalam menentukan kriteria isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan klausula baku antar pihak dalam mencapai keseimbangan dalam keadilan berkontrak. Serta juga menganalisis dan menjelaskan Kriteria Kontrak Konsumen Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Dan Pendekatan Kasus. Hasil Penelitian Tesis ini menyimpulkan bahwa Pengaturan klausula baku dalam mencapai keseimbangan dalam keadilan Berkontrak yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kebebasan berkontrak bagi kedua belah pihak maka dengan adanya asas keseimbangan dalam klausula baku ini harus dijadikan dasar untuk menentukan keabsahan dalam suatu perjanjian. Dan adanya keadilan berkontrak dalam kontrak konsumen merupakan prinsip persamaan, kesetaraan, dan kebebasan yang memiliki nilai keadilan yang dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen.

Kata Kunci: Asas Keseimbangan; Keadilan Berkontrak; Kebebasan Berkontrak

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, perjanjian demikian disebut dengan istilah kontrak bisnis. Dalam hukum perjanjian, kontrak bisnis dibedakan menjadi kontrak komersial dan kontrak konsumen. Kontrak komersial, merupakan perjanjian yang para pihaknya cenderung memiliki posisi yang sama sederajat dalam memperjuangkan hak dan kewajibanya. Sebagaimana dikatakan Ridwan Khairandy, bahwa “dimensi kontrak komersial lebih

menekankan pada aspek penghargaan terhadap kemitraan dalam kelangsungan bisnis.¹

Dimensi kontrak komersial menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban diantara para pihak pelaku bisnis. Keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak komersial dapat dilihat dengan diterimanya prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian bersifat universal. Prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis, sangat diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa perbedaan kepentingan diantara para pihak yang diserasikan melakukan mekanisme pembagian pembagian

¹ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, Fh Uii Press, Hlm 3

hak dan kewajiban berdasarkan asas proporsional dari para pihak dalam kontrak.

“Setiap langkah bisnis adalah langkah hukum” adagium atau ungkapan tersebut merupakan keniscayaan dalam dinamika bisnis modern. Prespektif bisnis, menganggap aspek hukum tersebut merupakan manifestasi penuangan proses bisnis ke dalam bahasa hukum dalam bentuk kontrak, yang sarat dengan pertukaran kepentingan di antara para pelakunya. Oleh karena itu, keberhasilan dalam bisnis, antara lain juga akan ditentukan oleh struktur atau bangunan kontrak yang dibuat oleh para pihak.²

Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama bisnis antarpelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan, dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada suatu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian. Sebenarnya secara yuridis, selain kontrak yang dibuat secara tertulis, para pihak atau pelaku bisnis juga dapat membuat kontrak secara lisan. Namun, kontrak yang dibuat secara lisan ini mengandung resiko yang sangat tinggi,

karena akan mengalami kesulitan dalam pembuktian jika terjadi sengketa hukum kontrak.³

Asas hukum dalam konsep hukum kontrak dalam hukum positif Indonesia, yakni KUHPerdara, diakomodir kedalam lima asas hukum perjanjian⁴ terdiri dari tiga asas pokok yaitu asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, dan dua asas penting lainnya, yaitu asas kepribadian serta asas itikad baik. Kelima asas tersebut, diharapkan dapat menciptakan keadilan sebagai tujuan utama dari keberadaan hukum. Adapun keadilan dalam perjanjian, harus dianalisis berdasarkan perpaduan konsep kesamaan hak dalam pertukaran prestasi dan kontra prestasi yang seimbang, sebagaimana dipahami dalam konteks keadilan komutatif, maupun konsep keadilan distributif sebagai landasan hubungan kontraktual.

Hubungan Kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan suatu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu, sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis tentang asas

² Ratna Puspitasari, *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Rumah Pada Perumahan Palm Residence Kota Surabaya (Analisis Hukum Terhadap Tahap Pra Dan Kontraktual)*. Universitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh Dari [Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/)

³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung : Mandar Maju. 2012. Hlm 1

⁴ Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet II*. 2004. Sinar Grafika. Hlm 16

proporsionalitas dalam kontrak justru dimulai dari aspek filosofis keadilan berkontrak.⁵

Konteks keseimbangan dapat ditemukan secara tersirat maupun tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang menegaskan dan berkorelasi dengan asas-asas hukum perjanjian yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagaimana titik fokus penelitian penulis yang mensoroti asas keseimbangan dalam tahap pra dan kontraktual penyusunan kontrak baku dilakukan analisis berdasarkan indikator pengaturan hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

Asas keseimbangan juga akan lebih spesifik ditemukan, apabila penguasaan hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas dalam kontrak baku tidak dilepaskan dari analisis melalui kaca mata Pasal 18 UUPK mengenai larangan pencantuman klausula baku yang dinilai memberatkan, tidak seimbang dan tidak adil.

Permasalahan dalam kontrak baku dalam rangka perlindungan konsumen relatif besar karena permasalahannya di dasari pada perbedaan kepentingan yang timbul dari pelaku usaha dan konsumen yang meliputi :

1. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dari pelaku usaha maupun konsumen

2. Kurangnya informasi yang lengkap dan jelas tentang isi perjanjian (klausula baku) dari produsen/pengembangan kepada konsumen
3. Keterbatasan pemahaman terhadap pentingnya perlindungan konsumen dari sisi pencantuman klausula baku dalam instrumen perjanjian di bidang perkreditan dan perumahan.
4. Keterbatasan pemahaman konsumen terhadap isi perjanjian (klausula baku)
5. Banyaknya pengaduan konsumen dibidang perbankan mengenai jasa dan produk.
6. Lemahnya pengawasan terhadap aspek klausula baku yang dilarang (Pasal 18 UUPK).

Asas keseimbangan dalam Pasal 18 UUPK ditujukan untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen tetap berada pada satu garis yang seimbang. Keseimbangan dalam penjelasan Pasal 18 ayat 1 UUPK tersebut dapat ditemukan apabila asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan batasan asas tersebut yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengenai asas itikad baik, serta Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdara mengenai “kausa yang legal” diterapkan dari mulai fase pra kontraktual.

Asas keseimbangan tercermin ketika para pihak yang akan membuat perjanjian di beri kebebasan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. Kebebasan yang dimaksud dalam Pasal 1338

⁵ Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontak Komersial*, Jakarta : Kencana, 2010. Hlm 47

KUHPerdata tersebut tidaklah mutlak, melainkan harus diimbangi dengan aturan yang menyatakan bahwa kebebasan tersebut diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, kepatutan, dan kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum dalam pembuatan mau pelaksanaannya.

Maka berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah Kriteria Kontrak Konsumen Yang Sesuai Dengan Prinsip Keseimbangan?
2. Bagaimanakah Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Praktik Kontrak Konsumen?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan yang menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁶

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*The Case*

approach). Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan di tangani. Pendekatan Konseptual merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Kriteria Kontrak Konsumen Yang Sesuai Dengan Prinsip Keseimbangan

Kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum, yang bertujuan melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun, seringkali ‘Kedudukan’ dari kedua pihak dalam suatu negosiasi yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan kontrak yang lebih menguntungkan satu pihak saja.⁸

Di Indonesia, aturan hukum yang ada mengenai klausula baku baru dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011. Hlm 32

⁷ Ibid. Hlm 24

⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, “Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum”*. Mandar Maju : Bandung. 2012. Hlm 216

Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku. UUPK hanya mengatur mengenai larangan pencantuman klausula baku pada dokumen tertentu dan larangan pencantuman klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat (Pasal 18UUPK), dan ditujukan dalam kontrak konsumen akhir berkaitan dengan pemakaian barang dan atau jasa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku juga hanya mengatur mengenai konsumen akhir khusus di bidang jasa keuangan.

Kontrak baku yang mengikat sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya lahir dari pembentukan hukum yang dimiliki oleh individu (*party authonomy*) yang pada dasarnya dilaksanakan melalui prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Prinsip ini dipatuhi berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dimana kontrak yang dibuat berlaku mengikat sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya (*contracting parties*).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara spesifik merupakan *lex specialis* dari penjabaran Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH

Perdata, yang sudah mengatur penerapan isi rambu-rambu utama dalam standar kontrak yaitu :

1. Ketentuan mengenai larangan untuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa kepada konsumen;
2. menyatakan pemberi kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran;
3. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. memberi kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa yang menjadi objek jual beli jasa;
5. menyatakan tunduknya konsumen pada aturan baru selama masa pemanfaatan barang dan jasa;
6. menyatakan bahwa konsumen diragukan dikarenakan adanya penentuan sepihak isi kontrak.⁹

Salah satu wujud dari asas kebebasan berkontrak adalah kontrak baku. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa kontrak baku adalah merupakan kontrak yang dibakukan, dipakai sebagai pedoman

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung. 2011. Hlm 96

atau patokan bagi siapapun yang menutup perjanjian tanpa kecuali, disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun mempergunakan syarat-syarat standar, ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan untuk melakukan penawaran atau negoisasi, sedangkan hal yang dibakukan adalah meliputi model, rumusan dan ukur.¹⁰

Menyangkut larangan mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 huruf b, sebaiknya ada batas waktu yang wajar. Hal ini merupakan pasangan dari larangan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen (huruf c). Jadi pelaku usaha dilarang untuk tidak menerima kembali barang yang sudah dijualnya dan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai pembayaran atas barang tersebut, tetapi tentu saja jika pengembalian barang tersebut dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Larangan dalam huruf d dari Pasal 18 ayat (1). Klausula baku yang berisikan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang dibeli secara angsuran adalah tidak adil. Disamping itu dapat

dikualifikasi sebagai penyalahgunaan keadaan konsumen, demikian juga ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f dan huruf h.

Ketentuan larangan membuat klausula baku bagi pelaku usaha yang tersebut dalam huruf e dari Pasal 18 ayat (1), tampak perlu pula direvisi. Larangan bagi pelaku usaha membuat klausula baku dalam huruf e seharusnya tidak hanya berkenaan dengan hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, tetapi juga perihal berkurangnya kegunaan barang atau jasa. Sehingga bunyi lengkapnya larangan tersebut yaitu, “mengatur perihal pembuktian atas hilangnya dan berkurangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen”. Apabila larangan klausula baku terbatas hanya pada perihal hilangnya kegunaan barang atau jasa, maka pelaku usaha dapat memanfaatkan kelemahan aturan yang ada dengan menunjuk pada persoalan berkurangnya kegunaan barang atau jasa di dalam suatu klausula baku.

Berdasarkan hal tersebut, kontrak baku mencerminkan ketidak seimbangan kedudukan para pihak. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam berkontrak bertentangan dengan prinsip persamaan yang intinya memberikan perlakuan yang sama terhadap orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Implementasi dari prinsip persamaan kedudukan ditentukan oleh proses awal penyusunan kontrak.

Dalam pembuatan kontrak baku maka prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia seperti persamaan atau kesetaraan dan kebebasan agar

¹⁰Ibid

dapat diimplementasikan dalam klausula-klausula yang dibuat, mengingat hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai isi dan berlakunya kontrak-kontrak baku agar memiliki nilai keadilan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Perbedaan posisi para pihak dalam pembuatan kontrak baku tidak memberikan kesempatan untuk melakukan “*real bargaining*”, sehingga pihak penerima kontrak tidak mampu mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi kontrak baku, sehingga melanggar hak kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Hukum perjanjian lahir dari pemikiran untuk memberi keadilan bagi para pihak. Asas keseimbangan dalam perjanjian merupakan unsur penting dalam mewujudkan keadilan, sekaligus sebagai upaya untuk menegakkan hukum dalam bidang perjanjian. Tercapainya keadilan adalah filosofi dari tujuan hukum karena keadilan merupakan tujuan substantif dari hukum. Hukum terasa “hambar” jika keadilan tidak terwujud dalam setiap peristiwa hukum, termasuk dalam peristiwa hukum perjanjian. Walaupun keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, di antara kepastian dan kemanfaatan hukum, namun tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Sebuah adagium hukum *Summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya).¹¹

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk*

Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Praktik Kontrak Konsumen

Keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak komersil, dapat dilihat dari proses negosiasi (pra kontrak) di antara para pihak. Negosiasi bertujuan untuk menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar-menawar.¹² Jika para pihak sepakat tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah naskah kontraktual. Sebaliknya jika pihak tidak sepakat pada isi perjanjian, maka perjanjian tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam kontrak komersial,¹³ keberadaan asas keseimbangan dalam berkontrak eksistensinya cukup kuat, karena jika isi kontrak tidak seimbang atau berat sebelah, maka lawan kontrak tidak akan pernah mau menerima klausul-klausul perjanjian. Asas keseimbangan yang lahir dari kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak

Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, 2009, Hlm. 217.

¹² Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Yogyakarta Lakhsang Mediatama, Hlm 1

¹³ Kontrak Komersil Merupakan Perjanjian Yang Para Pihaknya Cenderung Memiliki Posisi Yang Sama Sederajat Dalam Memperjuangkan Hak Dan Kewajibannya. Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Ridwan Khairandi. Bahwa “Dimensi Kontrak Komersil Lebih Menekankan Pada Aspek Penghargaan Terhadap Kemitraan Dan Kelangsungan Bisnis Para Pihak Pelaku Bisnis. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Kontrak Komersil Dapat Dilihat Dengan Diterimanya Prinsip-Prinsip Atau Asas-Asas Perjanjian Yang Bersifat Universal, Seperti Itikad Baik, Adil Dan Jujur Di antara Para Pihak Sehingga Memberikan Jaminan Dalam Memberikan Mekanisme Pembagian Hak Dan Kewajiban Berdasarkan Asas Proporsionalitas.

inilah yang menjadi sarana perlindungan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Sebaliknya dalam kontrak konsumen keberadaan asas keseimbangan sulit diwujudkan sebab dalam kontrak konsumen pada umumnya posisi tawar para pihak cenderung tidak seimbang, dimana kreditur memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari pada posisi tawar dari debitur. Posisi tawar yang tidak seimbang ini tidak jarang dimanfaatkan pihak kreditur untuk menentukan klausul-klausul yang menguntungkan dirinya. Sementara pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah, dalam hal ini debitur tidak ada pilihan lain kecuali menerima klausul-klausul yang telah ditentukan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi. Bahkan tidak jarang asas keseimbangan sering diabaikan oleh para pihak yang mengadakan kontrak konsumen.

Di Indonesia produk peraturan mengenai kontak bisnis di Indonesia yang telah bertujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak peserta kontrak. Upaya ini dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen yang dalam posisi lemah, peraturan perundang-undangan tersebut sebenarnya telah menetapkan rambu-rambu hukum yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak dalam berbisnis. Misalnya Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan lain-lain. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi instrument yang mampu mencegah terjadinya praktek pelaku

usaha dalam mengendalikan dan mencegah perbuatan yang menyimpang dalam kegiatan bisnis.

Dalam dunia hukum, pengertian kontrak sering digunakan secara bergantian dengan istilah perjanjian. Secara prinsipil antara keduanya tidak banyak perbedaan, dan mengenai hal ini diantara pakar hukum perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara. Yang dirumuskan: "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih.¹⁴ Ketentuan pasal ini secara normative memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan orang lain atau siapapun, dan juga mengenai apapun sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban Umum, maupun kesusilaan.

Kontrak konsumen merupakan jenis perjanjian atau kontrak yang memiliki karakter khas. Kekhasan kontrak konsumen pada umumnya terkait dengan bentuknya yang bersifat baku. Sifat baku ini menyangkut format perjanjian dan isi perjanjian. Dalam hal ini bentuk dan isi perjanjian pada umumnya ditentukan dan dibuat oleh pihak yang memiliki kedudukan yang besar, dalam hal ini pada umumnya kreditur, pihak konsumen pada dasarnya hanya diberi kesempatan untuk menerima atau menolak isi dan bentuk kontrak, tanpa diberi kesempatan untuk terlibat dalam pembahasan isi kontrak.

¹⁴Abdul Rahman Salimin, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan "Teori Dan Contoh Kasus"*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Hlm. 45

Sehubungan dengan krakternya yang demikian inilah, maka kontrak konsumen sering disebut sebagai kontrak baku, karena bentuk dan isinya sudah dibakukan oleh kreditur. Siapapun subjeknya dan apapun objek perjanjian serta syarat dan ketentuan-ketentuannya sudah ditentukan sejak awal oleh kreditur, tanpa memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menawar atau ikut menentukan bentuk dan isi perjanjian, termaksud klausul-klausul dan syarat-syarat yang merugikan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen selain mengatur mengenai isi klausula baku yang dilarang juga melarang bentuk penulisan klausula baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti. UUPK memberikan batasan larangan pencantuman klausula baku yang memuat isi dan bentuk tersebut yang hanya berkaitan dengan kewajiban konsumen.

Muatan kontrak baku dalam klausula baku yang tersebar dalam kontrak perbankan. Yang memberikan ketidakseimbangan kedudukan akan tercermin pada klausula-klausula kontrak baku yang dibuat, salah satu wujud dari ketidakseimbangan kedudukan dapat dilihat pada isi kontrak perbankan (lihat pada lampiran akhir) yang mencerminkan perlindungan yang berat sebelah atau sangat memihak kesalah satu pihak. Dibawah ini penulis akan melakukan analisis terhadap ketidakseimbangan kedudukan pada kontrak perbankan.

Rujukan asas keseimbangan mengaju pada unsur kesepakatan dan di isyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebab didalam kontrak konsumen, konsumen diharuskan untuk menerima segala isi perjanjian tanpa diberikan kesempatan untuk menentukan isi perjanjian. Jika memang terdapat kesepakatan, Maka hal itu hanya sebatas kesepakatan untuk menerima isi dan bentuk perjanjian. Tetapi hak dan kewajiban mengenai syarat dan konsekuensi tetap mengarah pada sisi konsumen sebagai pengguna jasa dan produk dari pelaku usaha. Terkait dengan persoalan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebab konsumen tidak diberikan melalui proses negosiasi sebagaimana yang dijabarkan dalam teori kontrak seperti yang dikemukakan oleh Van Dunn, yang mengingkan bahwa perjanjian dapat diawali sejak pra kontrak untuk melakukan negosiasi para pihak peserta perjanjian. Namun mengingat konsumen telah menyetujui isi kontrak apapun isinya dan alasan, maka secara hukum konsumen telah terikat pada isi kontrak tersebut.

Kontrak konsumen sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum dalam perjanjian harusnya digunakan dalam pembentukan kontrak konsumen. Sebab asas-asas umum dalam perjanjian tersebut meletakkan dasar yang adil dan seimbang terhadap para pihak perjanjian. Asas perjanjian disamping berfungsi sebagai landasan atau prinsip yang menjaga kepentingan para pihak, juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai keabsahan

suatu kontrak agar terjamin hak dan kewajiban masing masing pihak.

Dalam kontrak konsumen yang didasari oleh kenyataan bahwa pada umumnya pihak yang berposisi kuat mengatur hak- haknya dan tidak kewajibannya. Sehubungan dengan itu, untuk melindungi konsumen, sudah seharusnya tunduk pada asas-asas perjanjian yang berlaku pada perjanjian pada umumnya. Sebagaimana diketahui, bahwa klausula baku hanya memuat sejumlah kewajiban yang harus dipikul konsumen. Bahkan menurut Djumadi, proses pembuatan kontrak baku belum seluruhnya memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, terutama yang menyangkut unsur “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sebab yang dimaksud dengan sepakat disini mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat, yang berarti ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing masing, yaitu dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan tertentu dan penipuan.¹⁵ Klausula baku dalam perwujudannya merupakan objek perjanjian dari suatu prestasi, yang dimana tujuan dari klausula baku adalah untuk memberi kemudahan dan kepraktisan bagi para pihak yang bersangkutan.

Kedudukan para pihak dalam kontrak konsumen dapat dilihat pada teori John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan

bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu :¹⁶

1. Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar.
2. Perbedaan ekonomi dan social harus diatur sehingga terjadi kondisi yang efektif
 - a. terciptanya keuntungan maksimum yang yang reasonable untuk setiap orang, termaksud bagi pihak yang lemah
 - b. terciptanya kesempatan bagi semua orang.

Rawls juga berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar hanya karena dengan keadilanlah ada jaminan yang stabilitas hidup manusia. Agar tidak jadi terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.¹⁷

Asas keadilan dalam berkontrak yang dibuat oleh para pihak harus merupakan realisasi asas keseimbangan yang harus dalam perjanjian. Asas keseimbangan menurut Herliyon Budiono merupakan asas yang bertujuan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata. Dengan mendasarkan pada

¹⁵Djumadi, *Tinjauan Tentang Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan Dalam Era Hukum*, Jakarta, Universitas Tarumanegara, 1996. Hlm 72.

¹⁶Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010 Hlm 94

¹⁷Darji Darmodihardjo Dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2006. Hlm 2016.

pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan dilain pihak pada cara fikir bangsa Indonesia. Asas keseimbangan dalam membuat perjanjian sangat penting agar terjadi persamaan hak dan kewajiban diantra para pihak yang membuat perjanjian tersebut.¹⁸Dengan demikian terjadi keselarasan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Hukum perlindungan konsumen dalam kontrak konsumen menjadi bagian dari terjaminnya asas kebebasan berkontrak dan keseimbangan hak dan kewajiban. Sehingga dalam konsep perlindungan konsumen yang dimana pelaku usaha hendaknya memberikan manfaat baik bagi konsumen. bagi konsumen pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan konsumen yang mengatur hak dan kewajiban telah mempertegas posisinya sebagai konsumen yang dilindungi oleh hukum. Selain itu, pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan konsumen juga telah memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menuntut haknya apabila dirugikan konsumen. hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “ perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Payung hukum pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan kepastian hukum perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak konsumen. Kepastian hukum yang dimaksud dalam pengertian ini meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Adanya klausula baku dalam mencapai keseimbangan dalam keadilan berkontrak merupakan tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kebebasan berkontrak bagi kedua belah pihak. karena keseimbangan mengandung makna keselarasan dan tidak ada unsur atau elemen yang menguasai salah satu pihak. Maka dengan adanya asas keseimbangan dalam klausula baku ini harus juga dijadikan dasar untuk menentukan keabsahan dalam suatu perjanjian. sehingga apabila suatu saat ada perjanjian yang melanggar asas keseimbangan dan hal tersebut dapat dibuktikan, maka pengadilan dapat membatalkan perjanjian tersebut. Karena Asas keseimbangan yang lahir dari kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak inilah yang menjadi sarana perlindungan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

2. Bahwa Lahirnya Undang-Undang Perlindungan konsumen memberikan gambaran

¹⁸Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010. Hlm 29.

mengenai Kedudukan Para Pihak dalam Keseimbangan Keadilan Berkontrak. Adanya pembuatan kontrak konsumen merupakan prinsip persamaan, kesetaraan dan kebebasan yang memiliki nilai keadilan sertadapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sehingga dengan adanya prinsip yang adil dan seimbang antara kedudukan konsumen dengan pelaku usaha maka juga dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban dalam suatu kontrak/klausula yang berdimensi perlindungan konsumen.

2. Sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam kontrak konsumen, maka UUPK perlu dilakukan pengkajian atau perubahan terhadap substansi normanya. Hal ini dapat di lihat pada pasal 18 UUPK yang hanya sebatas pelarangan klausula baku. dan UUPK juga tidak memberikan kejelasan dan ketidaktegasan pemerintah dalam pemberian sanksi yang tegas terhadap kasus yang bersumber dan bermuara pada pelaku usaha.

Rekomendasi

1. Perlunya Pembentukan Undang-Undang Tentang Pedoman Pembuatan Kontrak Baku terdiri dari pasal-pasal yang mencerminkan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak guna memberikan bentuk perlindungan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yuda Hernoko, 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalm Kontak Komersial*, Jakarta : Kencana.
- Abdul Rahman Salimin, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan "Teori Dan Contoh Kasus"*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalm Kontrak Komersil*, Yogyakarta Laksbang Mediatama.

- Darji Darmodihardjo Dan Sidharta, 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Djumadi, 1996. *Tinjauan Tentang Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan Dalam Era Hukum*, Jakarta, Universitas Tarumanegara.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin, 2012. *Hukum Kontrak*, Bandung : Mandar Maju.
- Muhammad Syaifuddin, 2012. *Hukum Kontrak, "Memahami Kontrak Dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum"*. Mandar Maju : Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2011. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2010. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Grup, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH Uii Press.
- Salim H.S. 2004. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet II*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Jurnal

- Ratna Puspitasari, *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Rumah Pada Perumahan Palm Residence Kota Surabaya (Analisis Hukum Terhadap Tahap Pra Dan Kontraktual)*. Universitas Gadjah Mada